

Khatimah



Kemajemukan Islam Indonesia and
Pendidikan Karakter Bangsa¹

Oleh: Muhamad Ali ²

(183)

Kemajemukan keagamaan tidak saja diakui sebagai realitas empirik masyarakat Indonesia yang tidak bisa dinafikan dan ditolak, melainkan juga menjadi salah satu faktor pendorong dinamika masyarakat dan pembangunan.

—K.H. Irfan Hielmy.^{3—}

 engiringi krisis ekonomi yang berawal pada 1997 yang membuat kecewa para mahasiswa dan berbagai elemen bangsa atas rapuhnya moralitas dan hegemoni struktural dan kultural yang

1. Artikel ini edisi revisi makalah penulis yang disampaikan pada Interdisciplinary Colloquium dengan tema "Islam dan Kebhinekaan:



ZIARAH

cenderung bersifat homogenisasi dan standardisasi regim Orde Baru, Negara-bangsa Indonesia seolah-olah memasuki babak baru sejarah memperbaiki ke-Indonesian. "Umat Islam" yang sudah majemuk sejak sangat lama secara orientasi keagamaan, budaya, bahasa, sosio-ekonomik, dan politik, pun bergerak lagi, memunculkan kemajemukan yang lebih terbuka dan vokal di ranah publik. Di antara mereka, ada yang menekankan penyamaan karena yang mereka lihat kebebasan dan kemajemukan yang tidak terkendali; ada juga yang menitikberatkan kesamaan-kesamaan dan menganggap perbedaan-perbedaan harus dipinggirkan karena cende-

(184)

Merajut Kebhinekaan dalam Keikaan dalam rangka Pendidikan Karakter Bangsa", di Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, Rabu, 30 November 2011. Makalah ini direvisi kembali untuk mengenang jasa yang tidak terbalaskan, KH Irfan Hielmy, Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis, guru penulis salah satu sumber inspirasi ilmu dan kepribadian. Tulisan edisi revisi ini penulis dedikasikan untuk beliau, sebagai epilog buku ini.

2. Muhamad Ali, Ph.D., adalah santri Pesantren Darussalam, siswa Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Darussalam, 1989-1992, dan terus menjalin hubungan dengan keluarga Bapak Pengasuh, K.H. Irfan Hielmy, para ustaz dan ustazah, keluarga besar dan santri Darussalam, sepanjang perjalanan pendidikan dan karirnya di beberapa Negara. Sekarang assistant professor, Islamic Studies di Religious Studies Department, dan Southeast Asia: Text, Ritual and Performance, University of California, Riverside. Penulis dapat dihubungi di muhamadali74@yahoo.com
3. K.H. Irfan Hielmy, "Kerukunan Beragama", *Sentuhan Wahyu Penyardar Kalbu: Bahan Renungan Pribadi Sufi* (Bandung dan Ciamis: Yrama Widya dan Pusat Informasi Pesantren Darussalam, 2003), hal.107.



rung memecah belah; ada pula yang menyuarakan persamaan dan perbedaan sebagai dimensi positif dan konstruktif. Sekarang, titik balik (*turning point*) sejarah itu sudah terlewatkan lebih dari sepuluh tahun, dan berbagai elemen masyarakat, termasuk yang menganggap diri mereka sebagai bagian umat Islam, masih terus mencari makna Islam di tengah ke-Indonesiaan, lokalisasi, dan globalisasi: bagaimana menjadi Muslim (*being Muslim*), dan menjadi warga Indonesia (*being Indonesian*). Sebagian juga mencoba menemukan kembali (*reinvent*) identitas lokal masing-masing: menjadi Jawa, menjadi Aceh, menjadi Papua, dan sebagainya.⁴ Pencarian dan penegasan kembali berbagai identitas (agama, suku, bangsa, jender, kelas sosial, ideologi politik) berlangsung sebagai respons terhadap tantangan-tantangan baru. Dalam wacana global, ada citra umat Islam di Indonesia yang toleran, moderat, demokratis, dan akomodatif terhadap budaya-budaya lokal, tetapi di sisi lain, sebagian umat Islam terlibat aksi kekerasan dan terorisme, menganjurkan ideologi kekerasan, dan masih

(185)

-
4. Persoalan "identitas", jati diri, adalah perennial dan universal di semua masyarakat. Di Amerika Serikat, di Palestina, di Irak, di Iran, di Saudi Arabia, untuk menyebut beberapa saja, persoalan identitas mengenai "siapa orang Amerika itu", "Siapa orang Palestina", "Siapa orang Irak", dan sebagainya, jauh dari selesai. Di Amerika, Samuel Huntington misalnya menulis buku *Who are We?: The Challenges to America's National Identity* (New York: Simon & Schuster, 2005), dan berpendapat budaya nasional Amerika adalah Anglo-Protestant, dan imigrasi dari berbagai ras dan budaya merupakan tantangan yang bisa mengancam budaya nasional itu.



ZIARAH

terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyakit-peyakit moral lainnya. Indonesia menjadi negeri majemuk yang sering memperlihatkan paradoks, dan Islam pun menjadi bagian dari citra itu.

Upaya merekonstruksi hubungan Islam dan ke-Indonesian yang bhineka tetap penting baik bagi sarjana maupun tenaga pendidikan, para pemimpin, dan masyarakat luas. Lebih penting lagi, perlu ditelusuri bagaimana karakteristik Islam Indonesia yang majemuk member sumbangan penting bagi pendidikan karakter bangsa yang dibangun pemerintah dan masyarakat.

(186) Dalam tulisan ini, saya masukkan peran Pesantren Darussalam di bawah asuhan KH. Irfan Hielmy, yang menempatkan diri sebagai pesantren moderat dengan khitahnya “Muslim Moderat, Mukmin Demokrat, dan Mukmin Diplomat”, gagasan *Khaira Ummah*, Ummat yang sebaik-baiknya, dan pendidikan agama dan umum yang integral.⁵ Di kemudian hari, penelitian dan tulisan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai gagasan dan sumbangsih K.H. Irfan Hielmy dan pesantren Darussalam sangat diperlukan.

5. K.H. Irfan Hielmy, *Bunga Rampai Menuju Khairu Ummah I* (Ciamis: Pusat Informasi Pesantren Darussalam, 1994).



Empat Orientasi Ideologis Hubungan Islam dan Keindonesiaan:

Pertama, “*Islamization Yes, Indonesianization No*”

Menurut kerangka hubungan Islam dan ke-Indonesian, setidaknya ada empat orientasi ideologis di tengah masyarakat Indonesia kontemporer. *Pertama*, mereka yang berkeyakinan Islam itu satu dan Indonesia itu satu. Di antara mereka, ada yang berpendapat Islam dan Indonesia adalah dua identitas yang bertentangan, dan tidak ada persinggungan atau kesesuaian antara keduanya. Bagi kelompok-kelompok seperti *Hizbut Tahrir* (HT), Islam adalah wahyu Allah, sementara Indonesia adalah buatan manusia, yang meskipun lahir dalam konteks melawan penjajahan (kolonialisme dan imperialisme), tidak lahir atas landasan syariat Islam dan kekhilafahan (seperti yang mereka pahami). Sebagai sebuah gerakan politik yang menolak ambil bagian dalam proses politik di Indonesia dan menolak demokrasi sebagai ideologi *kafir*, Hizbut Tahrir mengusung konsep khilafah sebagai suatu kepemimpinan politik universal (ekumenikal) yang mewadahi seluruh orang Islam dan non-Islam yang harus tunduk kepada khalifah itu. Bagi mereka, yang meskipun kecil tapi menyebar di banyak daerah dan aktif di kampus-kampus dan rumah-rumah, jatuhnya kekhilafahan oleh Mustafa Kemal Attaturk (Turki) pada 1923/24, bukan sumpah pemuda tahun 1928 atau proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945, merupakan titik balik (*turning*



ZIARAH

point) sejarah yang harus dikembalikan pada saat ini dan masa depan. Menariknya, mereka juga mencari rujukan sejarah nusantara, khususnya bagaimana kesultanan-kesultanan seperti Peureulak, Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Gowa, Tallo, dan sebagainya *telah* melaksanakan syariat Islam. Bagi mereka, "Islam dan syariatnya sudah menyatu dan terimplementasi secara menyeluruh dan sistemis."⁶ Namun, zaman sekarang, upaya itu redup dan harus dihidupkan kembali, bersamaan di belahan dunia lain. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengutip potongan-potongan sejarah Islam dan menafsirkannya untuk menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan syariat dan khilafah Islam mereka saat ini tidaklah a-historis.

(188)

Mereka, misalnya, mencoba menunjuk adanya hubungan Khalifah Usmani dengan sultan-sultan di Nusantara, adanya ancaman kolonial Belanda, termasuk melalui ordonansi-ordonansi seperti peradilan agama, perkawinan, pendidikan, guru, sekolah liar, yang menghambat perkembangan Islam di Nusantara. Bagi mereka, perhatian ulama dan politisi Islam masa lalu terhadap khilafah tidak pernah benar-benar pudar, seperti terlihat pada *Muktamar Alam Islamy Far'ul Hindias Syarqiyyah* (MAIFHS, Konferensi Dunia Islam Cabang Hindia Timur) di Bogor, pada 1926. Lebih menarik lagi, bagi HTI, tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Haji Agus Salim (Sa-

6. Hizbut Tahrir Indonesia, *Jejak Syariah & Khilafah di Indonesia* (Jakarta: HTI Press, 2007), hal.12.



ZIARAH

rekat Islam), K.H. Mas Mansur, K.H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), dan K.H. A. Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama), merupakan tokoh-tokoh pejuang syariat Islam di Nusantara. Dan menarik ke masa lebih kontemporer, HTI berpendapat, “sejak momentum reformasi, sekalipun sekulerisme kapitalisme makin dihujamkan, suara Islam makin nyaring. Seruan menerapkan Syariah Islam bergema di berbagai daerah. Muncullah perda-perda yang bernuansa Syariah Islam. Seruan penyatuan umat ke dalam khilafah pun makin nyaring terdengar”.⁷

Dalam konteks Islam dan ke-Indonesiaan, HTI bisa dikategorikan kepada mereka yang meyakini ketunggalan Islam dan ketunggalan Indonesia, yang tidak bisa dikompromikan secara ideologis, meskipun mereka masuk dan berjuang dalam konteks Indonesia (dalam rangka membangun keislaman yang universal). Bagi mereka, Indonesia hanyalah tempat di mana syariat Islam dan khilafah—sebagaimana yang mereka pahami—harus ditegakkan. Mereka menolak UUD 45, Pancasila, Demokrasi, partai politik sekuler, dengan landasan keyakinan Islam sebagai ideologi satu-satunya yang tidak bisa digandengkan apalagi dinomorduakan dengan kebudayaan. Bagi mereka, Islam tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan tempat. Zaman dan tempatlah yang wajib mengikuti Islam. “Bukan dengan membuat interpretasi baru mengenai Islam agar sesuai dengan

(189)

7. Hizbut Tahrir Indonesia, *Jejak Syariah*, hal.31.



ZIARAH

keadaan masyarakat,..karena di sana terdapat masyarakat yang rusak dan hendak diperbaiki dengan suatu ideologi (*mabda*) secara *inqilabi* (revolusioner).⁸ Islam bagi mereka adalah ideologi global yang tunggal yang tidak mengakui kebhinekaan ideologi-ideologi dan nilai-nilai yang ada dalam agama-agama dan kebudayaan (baik yang dianggap sebagai "global", "asing", "Barat", maupun 'lokal').

(190)

Dalam pendidikan keluarga dan organisasi HTI, karakter atau kepribadian yang dibangun adalah karakter Islam yang homogen dan tertutup dan menutup akomodasi-akomodasi ideologis dan kultural. Ke-Indonesiaan adalah tidak lebih dari tempat di mana karakter itu harus disemai dan dipaksa menerima gagasan khilafah dan syariat. Bagi mereka, tidak ada nilai-nilai yang disebut sebagai nilai-nilai ke-Indonesian, kebangsaan, atau kebudayaan yang dipelajari dan diterima melalui prosesi sejarah yang panjang dan beragam. Bagi mereka, tidak ada Islam Jawa, Islam Bugis, Islam Aceh, atau Islam Banjar. Dalam pendidikan mereka, ditekankan hanya ada satu Islam. Mereka menolak "*al-âdah muhkamah*" dan "*lâ yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur al-zamân*".⁹ Bagi An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir

8. Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir (edisi Mu'tamadah)*, terj. (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004), hal.11.; Muhamad Ali, "Hizbut Tahrir Indonesia" (the Party of Liberation Indonesia). Editor(s): Henry Schwarz. Blackwell. *Blackwell Encyclopedia of Postcolonial Studies*, akan diterbitkan 2012.

9. An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, hal.12.



ZIARAH

yang berasal dari Palestina, yang menginginkan tegaknya khilafah Islam di negara-negara Arab, tapi kemudian menjadi global itu, sesuatu karakter dikatakan baik atau buruk bukan karena sesuatu itu sendiri, tetapi karena ada faktor eksternal. Hanya Allah dan Rasul-Nya yang menentukan baik dan buruk. Setiap hukum ibadah, akhlak, makanan, pakaian, *mu'amalat* dan *uqubat*, tidak boleh dikaitkan dengan *illat* sama sekali. Dan hanya Allah yang tahu hikmahnya, sementara akal manusia tidak akan menjangkaunya.¹⁰ Tradisi (*urf*) kadang-kadang bertentangan dengan syariat, dan kadang-kadang tidak, dan apabila bertentangan maka syariatlah yang menghapus dan mengubahnya, karena itu tradisi tidak bisa dijadikan dasar ataupun *illat* hukum syariat.

(191)

HTI menggunakan dikotomi "Negara Islam" dan "Negara Kafir". Dia dalam Negara Islam, kalangan non-Muslim harus tunduk pada kekhalifahan Islam. An-Nabhani menulis, warga non-Muslim dibiarkan menjalankan akidah dan ibadahnya, makanan dan pakaian, nikah dan talak, juga sesuai dengan agama mereka, namun dalam urusan muamalat lainnya, *uqubat*, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain, warga non-Muslim wajib mengikuti aturan syariat Islam yang berlaku untuk semuanya. Kewajiban Negara adalah menerapkan Islam secara keseluruhan. Pelaksanaannya terhadap non Muslim dianggap sebagai salah satu cara mengajak mereka ke-

10. An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, hal.60-63



ZIARAH

pada agama Islam, sebab syariat berlaku umum bagi seluruh umat manusia.¹¹ Karena itu, Indonesia bukan Negara Islam, tapi Negara Kafir. Kebhinekaan diakui sekadar sebagai wahana dan wadah tempat ideologi Islam diwujudkan. Tidak ada nilai-nilai intrinstik yang positif dan konstruktif di dalam kebhinekaan Indonesia dan budaya umat manusia. Tidak ada korelasi positif antara Islam dan ke-Indonesiaan.

Orientasi Kedua: “Islam First, Indonesia Second”

(192) Sebagai orientasi ideologis kedua, ada kelompok yang terlibat dalam proses demokratisasi di Indonesia, yang memperjuangkan Islam sebagai sistem yang komprehensif namun dalam konteks Indonesia yang majemuk secara budaya, agama, dan ideologi. Partai-partai politik “Islamis” seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan partai-partai lain yang segagasan dengannya, mengutamakan Islam sebagai sistem yang paling baik dan paling benar, namun berjuang mewujudkannya dalam konteks falsafah Negara Pancasila, UUD 45 (dan hasil amandemen) dan peraturan-peraturan lain. Namun, mereka memahami konstitusi dan falsafah ini bukan sebagai prioritas. Dalam banyak isu, seperti sistem pendidikan nasional, Ahmadiyah, UU anti-pornografi, partai dan gerakan-gerakan Islamis cenderung dianggap meminggirkan beberapa aspek kebhinekaan beragama dan

11. An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, hal. 93-94.



ZIARAH

berbudaya yang bagi kalangan nasionalis merupakan karakter ke-Indonesiaan. Mereka memiliki konsep *tarbiyah* dan *da'wah* yang merujuk pada sumber-sumber Abad Pertengahan seperti Ibn Taimiyyah, Ibn Al-Qayyim, dan abad modern seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Abu 'Ala al-Maududi, dan lain-lain. Mereka tidak menolak demokrasi (diterjemahkan menjadi *al-dimukratiyyah*), tapi bukan demokrasi liberal. Mereka mencoba melakukan Islamisasi demokrasi, dengan mengembangkan konsep-konsep Islam seperti *syura* dan *Mithaq al-Madinah* (didefinisikan sebagai Piagam atau Konstitusi Madinah). Mereka dipengaruhi pikiran-pikiran Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ikhwan al-Muslimin.

(193)

Kelompok-kelompok Islamis menjadikan Indonesia sebagai bangsa di mana umat Islam menjadi pemilik utamanya, dan menjadikan Islam sebagai *din*, atau pola hidup (*way of life*) yang lebih daripada definisi sempit "agama" yang prihatin dan personal. Mereka menomorsatukan Islam sebagai ideologi perjuangan, dan mengakui kebhinekaan budaya Indonesia sejauh itu tidak menghambat supremasi pemajuan Islam dan kemajuan umat Islam di Indonesia dan di manca Negara. Bagi mereka, *Islamic umma first, Indonesia second*, misalnya ketika mendukung Palestina, mengecam *double standard* Amerika di Timur Tengah, dan menyerukan *jihad* dan *dakwah* melawan kaum kafir Amerika, Yahudi, Zionis, dan sekutu-sekutunya. Mereka tidak menolak toleransi (*tasâmuḥ*) dalam pengertian kerukunan sosial antarumat beragama; terbukti mereka bisa berkoalisi dengan ber-



ZIARAH

(194)

bagai partai dan kelompok sejauh tujuan-tujuan dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Secara budaya, mereka lebih menyukai *nasyid* ala Arab yang menggunakan tema-tema keislaman, mendukung Islamisasi ilmu pengetahuan, Islamisasi budaya, Islamisasi ekonomi seperti bank syariah, dan Islamisasi masyarakat (*Islamization of society*) sebagai bagian dari program Islamisasi Indonesia secara keseluruhan. Mereka pun semakin pragmatis, tidak mengusung gagasan Negara Islam secara formal, tetapi menyuarakan "*clean and good governance*" ketika kampanye dan ikut berkompetisi dengan partai-partai politik Islam lain dan nasionalis "sekuler" dengan organisasi dan jaringan yang solid terutama di kota-kota dan kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Sebagai partai "*dakwah*" dan "*tarbiyah*", PKS tidak memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan karakter bangsa sebagai agenda tersendiri. Salah satu topik penting dalam tarbiyyah mereka adalah perang pemikiran (*al-ghazw al-fikri*) antara Islam dan sistem-sistem *jahiliyyah*, seperti materialisme, komunisme, orientalisme, dan kapitalisme. Lawan perang pemikiran mereka adalah Yahudi, Zionis, Kristen, Zoroaster, Politeis, Munafik, Ateis, dan kaum kafir lainnya yang bergerak di misi, pendidikan, buku-buku, media cetak, klub-klub, olahraga, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, hiburan, seni, musik, dan film. Mereka juga sering menggunakan teori konspirasi Zionis dan AS yang memerangi Islam.¹²

12. Irwan Prayitno, "Al-Ghazw al-Fikri", *Kepribadian Dai* (Bekasi:



ZIARAH

Mereka setuju dengan toleransi beragama dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik, bukan pada persoalan aqidah dan ibadah. Program utama mereka, adalah Islamisasi Indonesia, bukan Indonesianisasi, lokalisasi, atau diversifikasi Islam.¹³ Mereka memformulasikan nilai-nilai moral yang Islam seperti keadilan dan kesejahteraan, namun menafsirkannya dalam kerangka Islam sebagai jawaban (*Islâm huwa al-hâ*). Hubungannya dengan kelompok lain, mereka memiliki slogan “*Yakhtalitun walâkin yatamayyazun*” (mereka bergaul dengan kelompok lain, tapi memiliki identitas yang membedakan). Muatan *tarbiyyah* mereka adalah *tauhid*, *akhlaq* dan *fikrah*. Mereka pun membiasakan pemakaian istilah-istilah Arab, seperti *ikhwân* dan *akhwât*, *siyâsah*, *iqtishâd*, *hizb*, *musyâarakah*, *ma’îsyah*, *murabbi*, *mutarabbi*, *halaqah*, dan *usrah*. Terhadap formalisasi syariat Islam, PKS melakukan perjuangan bertahap: mereka melakukan dialog dengan kelompok-kelompok lain, termasuk non-Muslim mengenai konsep dan esensi *syariah*: menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Secara prinsip, PKS mengakui eksistensi penganut agama-agama lain sebagai *ahlu dzimmah*, dan memvisikan jaminan kebebasan

(195)

Pustaka Tarbiatuna, 2003), hal.3-4, dalam Greg Felly and Virginia Hooker, eds, *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006), hal.438-439.

13. Lihat misalnya, Yon Mahmudi, “Islamising Indonesia: the Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)”, tesis Ph.D, Faculty of Asian Studies, Australian National University, Canberra, July 2006.



ZIARAH

beragama dan hak-hak sipil mereka, seperti dicontohkan Piagam Madinah.¹⁴

Orientasi Ketiga: “*Formalistic Islam No, Substantive Islam & Indonesia, Yes*”

(196) Orientasi ideologis ketiga diusuarakan oleh kelompok yang menyebut diri mereka “progresif”, termasuk yang mengusung ide liberalisme, pluralisme, dan sekulerisme, dalam pengertian yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai substansi Islam. Bagi mereka, Islam, ke-Indonesian, dan progresifitas saling mendukung. Bagi mereka, yang mengambil rujukan pada berbagai sumber baik klasik, pertengahan maupun modern, Muslim dan non-Muslim, Islam memiliki nilai-nilai universal dan nilai-nilai partikular. Mereka lebih mengutamakan nilai-nilai universal itu, seperti keadilan, persamaan hak, kesejahteraan, kesetaraan. Bagi kalangan progresif, nilai-nilai yang universal bisa diterapkan dalam konteks Indonesia, dan setiap nilai universal dengan sendirinya adalah Islami, tanpa harus diberi label Islam. Nilai-nilai Islam bagi mereka bersumber dari Alquran, Sunnah, dan sejarah serta dari tokoh-tokoh zaman dan tempat yang terus berkembang, memberikan tempat terhormat bagi akal pikiran yang kritis terhadap sumber-sumber itu. Mereka menolak teokrasi, mempromosikan ide-ide demokrasi, hak-hak minoritas non-Muslim dan Muslim, hak-hak pe-

14. Lihat. Yon Mahmudi, “Islamising Indonesia: the Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)”, tesis Ph.D, op.cit.



ZIARAH

rempuan, dan kebebasan berpikir.¹⁵ Bagi sebagian mereka, seperti yang tergabung dalam Jaringan Islam Liberal (JIL), syariat Islam itu sudah liberal dan liberatif asalkan dipahami secara tepat dalam konteks ruang dan waktu Indonesia. Berbeda dengan HTI dan PKS, JIL dan kalangan yang seide dengan mereka, melakukan kritik terhadap cara pandangan ke-Islaman yang menurut mereka kaku dan tertutup dan anti pemikiran dan penafsiran rasional dan progresif.

Pendidikan karakter bangsa bagi kalangan progresif lebih merupakan penerjemahan nilai-nilai Islam dan agama-agama yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan hak manusia, perdamaian, kasih sayang, dan kemajuan. Karena Indonesia sudah majemuk, maka Islam tidak bisa tidak kecuali berwajah majemuk, atau multi-kultural. Islam sendiri pun, menurut mereka, memungkinkan dan bahkan meniscayakan kebhinekaan tafsir Islam. Karena itu, gagasan-gagasan seperti pribumisasi Islam, modernisasi Islam, Indonesianisasi Islam, lokalisasi Islam, pembebasan Islam, dan sejenisnya, muncul sebagai respons terhadap kalangan Muslim yang mengutamakan wacana Islamisasi yang sering oleh kalangan lain

(197)

15. Lihat antara lain, Charles Kurzman, ed., *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998); Abd Moqsih Ghazali, ed., *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Kebergamaan Yang Dinamis* (Jakarta: Penerbit Jaringan Islam Liberal, 2005); Muhamad Ali, "the Rise of Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia", *American Journal of Islamic Social Sciences*, 22,1, 2005, hal.1-27.



ZIARAH

(198)

tidak dibedakan dari Arabisasi dan masalalu-isasi (*salafiyya*). Yang menarik, ke-Indonesiaan bagi mereka adalah Indonesia yang majemuk, yang kaya budaya, yang toleran dan akomodatif bagi berbagai gagasan luar dan dalam, bukan Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. Negara agama bagi mereka bukan asli Islam dan bukan asli Indonesia. Bagi mereka, Indonesia adalah konsep bangsa yang memiliki nilai-nilai positif dan konstruktif bagi menjadi Muslim yang lebih cocok dan dinamis. Dan bagi mereka, Islam itu majemuk, dinamis, dan terbuka bagi penafsiran-penafsiran yang rasional dan progresif. Lebih lanjut, mereka merumuskan apa yang disebut *fikih lintas agama*, karena masyarakat Muslim Indonesia "*fiqh-oriented*", berlandaskan pada kajian-kajian ayat, hadis, dan ushul fiqh, terutama *al-kulliyat al-khamsah* Imam Al-Ghazali dan Imam al-Syatibi (melindungi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan), membahas tema-tema seperti kesinambungan, kesamaan dan titik temu agama-agama, ajaran kehanifan yang non-sektarian, non-komunalistik, Al-Islam sebagai agama kemanusiaan. Fiqih Lintas Agama yang menuai pujian dan kritik ini, membahas isu-isu kontroversial seperti mengucapkan salam kepada non-Muslim, mengucapkan selamat natal dan selamat Hari Raya agama-agama lain, menghadiri perayaan hari besar agama lain, doa bersama, kawin beda agama, waris beda agama, toleransi, dialog dan kerjasama agama-agama.¹⁶

16. Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: Membangun*



ZIARAH

Buku lain yang ditulis kalangan progresif— meski tidak se“liberal” buku Fiqih Lintas Agama, adalah *Islam & Multikulturalisme*. Modul ini memuat tulisan-tulisan tentang bagaimana menyikapi perbedaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan hak-hak asasi manusia. Salah satu tulisan dalam buku ini membahas kaum muslim di Indonesia sebagai bagian dari *ummah* dan bangsa. K.H. Hasyim, misalnya, adalah seorang Jawa, Indonesia, dan Muslim sekaligus. Menurut penulisnya, “tantangan pembangunan-bangsa berhasil dijawab dengan baik jika kaum Muslim di negeri ini bisa tampil percaya diri sebagai seorang Muslim yang taat dan sekaligus sebagai warganegara Indonesia yang loyal.”¹⁷ Baginya, dan bagi penulis dan aktifis progresif lainnya, keislaman dan ke-Indonesiaan (dan bahkan kemanusiaan yang lebih luas dan global) tidak bisa dipisahkan, seperti telah dirumuskan Kiai Ahmad Siddiq, yang sering dikutip Abdurrahman Wahid dalam ungkapan “*ukhuwwah Islamiyah*, *ukhuwwah wataniyyah*, dan *ukhuwwah basyariyyah*. Di akhir kesimpulan modul ini, penulis menutup dengan kalimat “kaum Muslim di Indonesia berkewajiban untuk menerima Indonesia sebagai sebuah Negara-bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok agama yang ber-

(199)

Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan the Asia Foundation, 2004).

17. Ihsan Ali-Fauzi, “Kaum Muslim di Indonesia sebagai Bagian dari *Ummah* dan Bangsa”, dalam Syafiq Hasyim, Ihsan Ali-Fauzi, dan Dadi Darmadi, eds, *Islam & Multikulturalisme* (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2008), hal.174.



ZIARAH

beda.”¹⁸ Menurut salah satu rujukan tulisan ini, “Islam tidak dapat dipisahkan dari kebangsaan, identitas orang Islam yang Indonesia dan orang Indonesia yang Islam.”¹⁹ Di sini pendidikan karakter bangsa, meski tidak secara eksplisit, berarti pendidikan yang berorientasi kemajemukan, dan bagi umat Islam, pendidikannya adalah pendidikan kemajemukan yang dilandasi nilai-nilai universal Islam, bukan semata-mata simbol-simbol dan bentuk-bentuk lahiriyah keagamaan.

Orientasi Keempat: “Islamization Yes, Indonesianization Yes”

(200)

Orientasi ideologis keempat, dianggap “mainstream”, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan masyarakat yang berkembang dari tradisi madrasah, pesantren, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) dan perguruan-perguruan tinggi agama Islam (PTAI) lainnya. Kelompok “*mainstream*” di Indonesia yang sering disebut “moderat” itu memiliki jasa yang besar dalam pembentukan karakter masyarakat Muslim dan bangsa Indonesia. Rumusan Muhammadiyah tahun 1959 “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam se-

18. Ihsan Ali-Fauzi, “Kaum Muslim di Indonesia sebagai Bagian dari *Ummah* dan Bangsa”, hal.183.

19. Ahmad Suedy, “Keislaman dan Keindonesiaan Tak Bisa Dipisahkan”, *Kompas*, 17 Juli 2007, dalam Ihsan Ali-Fauzi, hal. 183-184.



hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya”, menunjukkan tujuan ormas ini yang tidak berorientasi pada politik kekuasaan, tapi pada masyarakat. Secara umum, Muhammadiyah menjaga keseimbangan antara purifikasi aqidah dan dinamisasi muamalah, keuniversalan Islam dan partikularitas budaya lokal, sambil terus menitikberatkan visi dan misi dakwah dan pendidikan yang berpegang pada *amar ma’ruf nahi munkar*, yang “moderat”, “tidak radikal”, “membela bangsa”, “mempertahankan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”²⁰ Pendidikan karakter bangsa, menurut versi Muhammadiyah, tidak bisa dipisahkan dari pendidikan Islam yang moderat itu karena posisi umat Islam yang di tengah (*ummatan wasathan*). Salah satu buku pedoman yang secara implisit memuat nilai-nilai pendidikan karakter adalah Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah sebagai hasil muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Buku Pedoman ini memuat Pandangan Islam tentang kehidupan, kehidupan Islami warga Muhammadiyah, mencakup kehidupan pribadi, kehidupan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, berbisnis, berprofesi, melestarikan lingkungan, mengembangkan

(201)

20. Lihat Suyoto et al, *Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting: Ketegangan antara Purifikasi dan Dinamisasi* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2005); Muhamad Ali, “Gerakan Islam Moderat di Indonesia Kontemporer”, dalam Rizal Sukma & Clara Joewono, eds, *Gerakan & Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 2007), hal. 211.



ZIARAH

(202)

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan dalam seni dan budaya. Buku Pedoman ini mengandung prinsip-prinsip nilai dan norma, aktual, memberikan arah, ideal, rabbani/ketuhanan, dan bersifat memudahkan (*taisir*). Dalam kehidupan bermasyarakat, Pedoman ini menekankan bahwa Islam mengajarkan agar setiap Muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya. Dalam bertetangga dengan non-Muslim, diajarkan bersikap baik dan adil, karena mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam. Pedoman ini juga memuat prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, kerjasama umat manusia, jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan.²¹

Dalam kaitan keislaman dan ke-Indonesiaan, misalnya, menurut salah satu aktifisnya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bersifat ideologis, karena Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang meyakini bahwa Islam sebagai satu-satunya Agama Allah yang benar, berdasarkan *Tauhid* dan bersumber kepada Al-

21. Muktamar Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2000), hal.1-5, 18-21.



ZIARAH

quran dan Sunnah Nabi. Muhammadiyah juga bertujuan membangun masyarakat utama *khairu ummah* dan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Menurutnya, Muhammadiyah melakukan pemurnian (purifikasi, revitalisasi) dan pembaruan (reformasi, dinamisasi, transformasi) dan menjunjung tinggi *ukhuwah Islamiyah* dan *ishlah* untuk terciptanya *rahmatan lil a'lam*. Di tengah bermunculannya ormas-ormas dan komunitas-komunitas sosial keagamaan baru setelah 1998, Muhammadiyah dituntut melakukan reposisi identitas dan perjuangannya. Misalnya, Muhammadiyah dituntut menjaga jarak dari radikalisme agama, sambil terus meneguhkan dirinya sebagai agen Islam moderat. Secara lebih strategis Muhammadiyah harus menghadapi tantangan pluralisme, spiritualisme, demokratisasi, gerakan formalisasi syariat Islam, terorisme global dan regional, kekerasan atas nama agama, liberalisasi Islam, dan sebagainya.²²

(203)

Kemudian, Nahdlatul Ulama, yang dianggap mewakili tradisionalisme Islam karena lahir dari kalangan ulama pesantren, mengemban visi dan misi keislaman yang berada di tengah-tengah dalam pengertian melestarikan teologi *Ahlussunnah waljama'ah* yang akomodatif terhadap budaya lokal, dibandingkan dengan Muhammadiyah yang lebih puritanistik. Perjalanan NU sejak

22. Lihat perdebatan hal ini di Mukhaer & Nur Ahmad (eds.), *Muhammadiyah Menjemput Perubahan: Tafsir Baru Gerakan Sosial-Ekonomi-Politik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas & STIE Ahmad Dahlan Jakarta, 2005).



ZIARAH

awal hingga sekarang bersifat kompleks dan dinamis, meskipun terus dianggap sebagai wakil Islam tradisional yang moderat. Secara khusus, NU lahir sebagai respons terhadap dua peristiwa besar: penghapusan khalifah oleh Turki dan serbuan kaum Wahabi ke Mekkah. NU lahir untuk mempertahankan tata cara ibadah keagamaan yang dikecam Wahabi ketika itu seperti berkaitan dengan kuburan, ziarah, doa tahlil, kepercayaan kepada para wali, dan semacamnya. NU juga harus hadir untuk menjaga mazhab Ahlussunnah wal-jama'ah dan mazhab fiqih Syafi'i yang sudah dianut banyak ulama dan pesantren di Jawa khususnya. NU pun harus memperbanyak pondok-pondok, madrasah-madrasah, mesjid, langgar, seperti halnya mengurus anak yatim dan fakir miskin, serta memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tiada dilarang Islam.²³ Dalam konteks moderasi politiknya, NU kembali kepada Pancasila, seperti ditegaskan KH Ahmad Siddiq yang manjur dan berpengaruh pada tokoh-tokoh NU setelahnya, termasuk Abdurrahman Wahid. KH Ahmad Siddiq misalnya berpidato: "Dasar Negara Pancasila dan agama Islam dua hal yang dapat sejalan dan saling menunjang." KH Ahmad Siddiq tegas dalam menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi-organisasi masyarakat dan politik.

(204)

23. Andrée Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal.11-3.



ZIARAH

Dalam hubungan Islam dan Pancasila, KH Ahmad Siddiq menyatakan, "bentuk Negara kesatuan RI yang sekarang ini adalah bentuk final dari seluruh usaha pendudukan Nusantara, termasuk umat Islam...Umat Islam Indonesia adalah mayoritas, karena itu semua persoalan rakyat Indonesia adalah identik dengan persoalan umat Islam Indonesia. Dalam pada itu, Pancasila sebagai ideologi Negara dibenarkan oleh Islam."²⁴ Adalah KH Ahmad Siddiq yang menawarkan trilogi persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan basyariah*). Mengenai pentingnya sikap moderat, KH Siddiq misalnya mengatakan, "Islam tidak membenarkan sikap ekstrem/menghujung (*tatharruf*= melihat sesuatu hanya dari satu ujungnya saja) dan sikap berlebih-lebihan". KH Siddiq menerjemahkan *tawassuth* dan *i'tidal* sebagai sikap kewajaran: "Wajar dalam melihat sesuatu dan wajar bersikap terhadapnya, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkekurangan."²⁵ Menurut Andrée Feillard, jalan tengah ini sesuai dengan tradisi Jawa yang ditandai pencarian terhadap suatu harmoni masyarakat. Sementara Benedict Anderson menilai NU sebagai kelompok yang ingin

(205)

-
24. Ahmad Siddiq, "Hubungan Agama dan Pancasila", dalam *Kajian Agama dan Masyarakat*, hal.255-268; dikutip oleh M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995), hal.207-8; Andrée Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal.185-249.
 25. Dikutip dalam Andrée Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal.250.



ZIARAH

mempertahankan dan memperluas suatu pola kehidupan religius.²⁶

Dengan demikian, bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, keislaman dan ke-Indonesiaan tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dan menyokong. Kedua ormas ini lahir di Jawa, kemudian merebak ke seluruh daerah di nusantara dan bahkan ke luar negeri. Pendidikan Islam yang mereka kembangkan cukup berbeda dalam hal penekanan dan strateginya, namun orientasi keagamaan mereka tidak menegasikan ke-Indonesiaan. Ke-Indonesiaan yang mereka bayangkan adalah paham kebangsaan yang memiliki nilai instrinsik positif dan konstruktif bagi kehidupan umat Islam yang relatif homogen di satu sisi (Sunni dan Syafii) tapi tetap bisa berdialog dengan kelompok lain seperti Syiah dan mazhab-mazhab lainnya, dan bahkan dalam banyak kesempatan juga dengan agama-agama lain baik di Indonesia dan maupun di manca Negara. Maka, ketika banyak orang mereka menyuarakan dan mengadakan program pendidikan karakter, mereka sudah memiliki paradigma dan program konkrit, meskipun terus melakukan pembaharuan-pembaharuan. NU dan Muhammadiyah telah dan terus berjasa membangun karakter umat Islam dan karakter bangsa, juga dalam hubungannya dengan penganut-penganut agama lain dan bangsa-bangsa lain pula.

(206)

26. *ibid.*, hal.413, 415.



ZIARAH

NU memiliki basis utama pesantren-pesantren di Indonesia. Namun, ada banyak pesantren yang tidak berafiliasi dengan NU maupun Muhammadiyah. Pesantren Darussalam, Ciamis, adalah salah satu pesantren besar yang tidak berafiliasi secara organisatoris kepada ormas tertentu, meskipun ada beberapa kesamaan dalam doktrin dan praktek keagamaan dan sosial dengan yang lain. Khittah Muslim moderat, Mukmin demokrat, dan Muhsin diplomat menunjukkan kombinasi trilogi Islam, Iman, dan Ihsan dan nilai-nilai moderasi, demokrasi, dan diplomasi. Penyerahan diri kepada Allah (*islam*), keyakinan kepada Kebenaran (*iman*), dan Kebaikan dengan Pengawasan Ilahi (*ihsan*), digandengkan dengan nilai-nilai jalan tengah (*wasathan*) diantara kekurangan (*ifrath*) dan kelebihan (*tafrith*), serta berbagai bentuk ekstrimitas manusia dan kelompok, dengan nilai demokrasi (bukan Negara Islam, Negara agama, bukan teokrasi, bukan anarki, tapi musyawarah yang penerapannya bersifat prosedural dan substantif), serta nilai diplomasi (bukan perang, bukan kekerasan, bukan kekuatan militer (*hard power*)). Khittah ini sangat dalam makna dan luas penerapannya dalam konteks Islam, keIndonesiaan dan dunia pada umumnya.

(207)

Rekonstruksi Sejarah Kebhinekaan Indonesia dalam Kerangka Sejarah Dunia

Islam lebih dulu dari konsep Indonesia sebagai "Nation", sebagai Negara-bangsa, tanah air, tempat tinggal, yang sejak awal abad ke-20 menjadi simbol pemersatu ber-



ZIARAH

bagai suku, budaya, dan agama-agama. Pada 1945 pun, Pancasila lahir sebagai falsafah Negara dan bangsa yang diilhami oleh penafsiran Islam substantif para perumus-nya. Pancasila menjadi *common platform* berbangsa dan bermasyarakat dan bagi banyak orang menjadi ideologi toleransi atau kerukunan.

Perlu diakui adanya hubungan yang tidak linear, tapi dinamis dan kontekstual antara Islam, Nasionalisme Indonesia dan tradisi-tradisi lokal sepanjang sejarah awal dan paska kemerdekaan. Pada umumnya, nasionalisme didefinisikan oleh kalangan *mainstream*, terutama yang berkuasa (*those who holds power*), dan karena itu secara sengaja maupun tidak melakukan inklusi dan eksklusi sekaligus. Selalu ada yang dipinggirkan dalam pembanguan bangsa di banyak negeri: kaum minoritas etnis dan agama, kaum perempuan, kaum miskin, dan seterusnya. Di Indonesia, dan Asia Tenggara, karena faktor sejarah penyebaran dan kulturalnya, Islam terutama dipahami sebagai Sunni dan Syafi'i, dan hanya sedikit yang mengikuti Syiah, atau Mu'tazila, atau bahkan mazhab selain Syafi'i. Kelompok Ahmadiyah juga terpinggirkan, dan dalam beberapa dekade dianggap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam sebagai kelompok di luar Islam. Kaum masyarakat adat juga masih terpinggirkan, begitu pula para penganut kebatinan dan penganut agama minoritas (baik Muslim di daerah mayoritas Kristen atau Hindu). Nasionalisme Indonesia juga men-eksklusi mereka yang tidak beragama resmi (dulu 5 sekarang 6 termasuk Konghucu). Di antara aga-



ZIARAH

ma-agama yang resmi pun, penafsiran keagamaan mereka harus bersesuaian dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun awalnya Agama Hindu itu politeistik dan Agama Buddha tidak memiliki Tuhan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila *common platform* yang diilhami doktrin monoteis Islam (yang mirip dengan Yahudi dan Kristen, tapi berbeda dengan agama-agama lain dan agama-agama animistik, agama-agama asal dan awal masyarakat di Indonesia (Menarik pula, agama-agama ini tidak disebut agama tapi “kepercayaan”).

Dalam kajian *nation* dan nasionalisme di Barat, agama justru terpinggirkan jika tidak tergantikan oleh paham kebangsaan.²⁷ Namun, di Nusantara, banyak tokoh dan kelompok umat Islam merujuk pada konsep “cinta tanah air (*watan*) bagian dari iman” dan “*jihad fi sabilillah*” dalam arti membela tanah air melawan kezaliman dan penjajahan (seperti pada masa kolonial), selain konsep *syu’ubiyah* (kesukuan) yang menjadikan bangsa Arab berkembang membentuk komunitas-komunitas yang terus bersaing satu sama lain, dan dengan bangsa-bangsa non-Arab (*‘ajami*). Konsep *watan* berkembang seiring dengan konsep *ummah*, yang sering dikonotasikan komunitas religius yang melampaui batas-batas teritorial Negara. Nasionalisme bagi kaum Muslim di Indonesia tidak berarti sekuler dan anti-agama. Agama

(209)

27. Lihat Benedict Anderson, *Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (No Place: Verso, 1993).



ZIARAH

menjiwai dan mendukung nasionalisme.²⁸ Dengan demikian, meskipun ada dua kelompok “nasionalis” dan kelompok “Islam” menjelang dan di awal kemerdekaan, banyak diantara kelompok nasionalis sesungguhnya adalah Muslim, selain Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Begitu pula, mereka yang menamakan diri mereka kelompok Islam juga tidak menafikan patriotisme dan bahkan nasionalisme, yang mereka pahami secara berbeda makna dan perwujudannya. Sebagian mereka bersikap substantifistik, dan sebagian lain formalistik.

(210) Menariknya, kebangsaan Indonesia tidak muncul hanya dari satu kelompok etnis mainstream atau mayoritas belaka, misalnya Jawa, Sunda, atau Bugis. Kebangsaan Indonesia lahir dan berkembang di daerah-daerah dimana mereka membutuhkan solidaritas yang lebih luas daripada suku-suku mereka. Bahasa Melayu (kemudian disebut bahasa Indonesia pada tahun 1928), bukan bahasa Jawa, menjadi bahasa pemersatu, tanah air menjadi tanah air Indonesia (bukan tanah air Jawa, tanah air Sunda, Bugis, dan sebagainya), dan bangsa mereka namakan bangsa Indonesia, bukan bangsa Jawa yang waktu itu menjadi. Para pendiri bangsa ini pun tidak menggunakan agama sebagai alat pemersatu, meskipun ada kelompok

28. Lihat Michael Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia* (London: Routledge, 2002); Muhamad Ali, “the Concept of *Umma* and the Reality of the Nation-State: A Western and Muslim Discourse”, *Kultur*, 2, 1, 2002, hal.37-49.



yang menginginkan konsep Negara Islam karena umat Islam mayoritas. Mereka justru merumuskan sila-sila yang kemudian menjadi falsafah Negara, Pancasila. Meski membayangkan kebangsaan itu, masyarakat suku-suku tetap memiliki identitas kedaerahan mereka. Ada kebhinekaan suku, bahasa daerah, kebudayaan daerah (pakaian, makanan, bentuk tempat tinggal, seni, dan bahkan kearifan lokal (*local wisdom*)). Islam dan tradisi sering dipahami memiliki pertentangan paradigmatis, namun di pihak lain, menjadi Muslim selalu berarti menjadi Muslim dalam konteks bahasa dan budaya daerah masing-masing dimana mereka lahir ataupun tinggal. Pada poin ini, tampaknya tidak ada konflik dan masalah yang berarti mengenai hubungan Islam dan kebhinekaan dalam keikaan Indonesia. Namun, dalam perjalanannya ada banyak persoalan yang menyita perhatian serius, dan terutama ketika kita menganggap faktor pendidikan adalah salah satu sumber masalah dan sekaligus pemecah masalah-masalah itu.

(211)

Pemikiran KH Irfan Hielmy tentang Pendidikan Karakter Bangsa

Dari paparan di atas, kesatuan dan kebhinekaan menjadi dua aspek penting yang tidak terpisahkan, yang dapat menjadi bagian karakter yang ditanamkan dan dipelajari melalui pendidikan di semua tingkatan. Pendidikan sikap atau akhlak itu menjadi *common concern* bagi semua orientasi ideologis di atas. Lalu, di mana posisi Pendidikan Agama Islam di tengah kebhinekaan itu? Falsafah



ZIARAH

Pendidikan menentukan sistem pendidikan, dan sistem pendidikan memiliki hubungan dengan budaya masyarakat. Nabi Muhammad pernah bersabda “Aku tidak diutus kecuali untuk memperbaiki karakter manusia”.(Hadits). Dan penyair Mesir, Ahmad Syauqi, pernah melantunkan: “Bangsa-bangsa itu akan tetap eksis selama karakter mereka terpelihara. Jika karakter mereka runtuh, maka bangsa itu runtuh pula.” Sementara Ayat Al-Quran sudah menjelaskan metode yang perlu dijabarkan lebih sistematis: “Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik dan dialog yang terbaik...” (Al-Nahl:125).

(212)

Adapun mengenai isi pendidikan karakter di Indonesia, sudah banyak lembaga dan pemikir yang merumuskan. Yayasan Jati Diri Bangsa, misalnya, merumuskan lima sikap dasar: jujur, terbuka, berani mengambil resiko dan bertanggung jawab, memenuhi komitmen, dan kemampuan berbagi.²⁹ Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter adalah untuk “mengembangkan nilai-nilai yang berbentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara

29. Dikutip dalam M. Quraish Shihab, “Mewujudkan Misi Nation and Character Building”, *Membumikan Al-Qur’an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Penerbit Lentere Hati, 2011), hal.727.



ZIARAH

agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia." Pusat Kurikulum Mendiknas mengidentifikasi toleransi, cinta damai, dan peduli sosial, sebagai bagian dari 18 nilai pendidikan karakter.³⁰

Pendidikan karakter di lingkungan Islam dan non-Islam, bisa membahas isu-isu "*how to live together*", seperti "Aliran Sesat", "Budaya Asing", "Pluralisme", "Kebebasan Beragama", "Ahmadiyah", "Syiah", "Terorisme", "Konflik Etnik-Agama", "Kekerasan Rumah Tangga", dan sebagainya. Isu-isu ini dan masih banyak lagi, tentu menuntut pemikiran yang cerdas dan tepat agar kebhinnekaan dan keikaan dapat dipahami dan diakui sebagai sama-sama penting (meskipun sebagian mementingkan satu daripada yang lainnya). Dalam upaya ini, sumber-sumber Islam, sejarah Indonesia, kebudayaan lokal, dan kebudayaan global yang relevan dan konstruktif dapat terus menjadi rujukan dalam rangka terus membangun pendidikan karakter umat Islam dan bangsa Indonesia.

(213)

K.H. Irfan Hielmy adalah sosok guru besar (*syaiikh*) yang tawaddhu, melebihi banyak mereka yang berpendidikan formal bahkan professor dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan baik di Timur maupun di Barat. K.H. Irfan

30. Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011, "Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter". Lihat Muhammad Sirozi, "Mengefektifkan Pendidikan Karakter", makalah disampaikan pada the 11th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011.



ZIARAH

Hielmy adalah otodidak sejati yang luas ilmu danawasannya, dengan teladan yang seluruh keluarga, santri, masyarakat, dan bahkan pemimpin-pemimpin (termasuk bupati, gubernur dan presiden) telah belajar darinya. Bagi beliau, pendidikan yang berketeladanan adalah pendidikan karakter sesungguhnya.

Menurut K.H. Irfan Hielmy, *tarbiyyah* atau pendidikan adalah termasuk dakwah khasah, dakwah khusus. Beliau menyebut Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) sebagai salah satu gagasan dan program mulia dan telah berhasil sebagai jawaban dan keprihatinan para ulama. Beliau menyebut jasa Prof. Dr. Munawir Sadzali, MA saat beliau menjawab Menteri Agama RI.³¹ K.H. Irfan Hielmy tidaklah anti-filsafat, meskipun hal ini sesuai dengan kadar berpikir masing-masing manusia. Beliau menulis, "Dogmatik saja, hanya sanggup menanam keyakinan, mungkin pula keyakinan yang disertai dengan faham yang tidak serba luas. Sedangkan filsafat memperluas alam pikiran dan perasaan, mengarahkan ajaran untuk meninjau yang jauh dengan pandangan dan perasaan yang jauh pula."³²

K.H. Irfan Hielmy melihat pentingnya menggabungkan *akal taklifi* dan *akal syar'i*. Mengenai akal ini, yang merupakan anugrah Allah, beliau mengutip Said Hawwa dengan akal taklifi-nya, dan Imam al-Ghazzali dengan

31. K.H. Irfan Hielmy, *Bunga Rampai Menuju Khairu Ummah I*, 58.

32. K.H. Irfan Hielmy, *Bunga Rampai Menuju Khairu Ummah I*, 177.



ZIARAH

pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu, yaitu jenis akal yang dimiliki setiap manusia yang sehat. “Tak pandang apakah ia seorang Muslim, non-Muslim, bahkan ateis sekalipun...Ilmu atau science adalah bagian dari aspek kehidupan yang dapat diperoleh manusia lewat jenis akal ini,” beliau menulis.³³ Beliau berpendapat dan yakin bahwa dengan kekuatan akal ini, manusia menalar, mengembangkan logika berpikir, berfilsafat, menggali ilmu pengetahuan. Sedangkan akal syar’i dianugerahkan Allah untuk mengenal-Nya, memahami perintah-perintah-Nya, beriman kepada-Nya, dan konsisten dengan ajaran-ajaran-Nya. Bagi K.H. Irfan Hielmy, kedua jenis akal ini penting dikembangkan manusia Muslim dimanapun dan dalam kondisi apapun.

(215)

K.H. Irfan Hielmy memahami pentingnya ilmu agama dan ilmu-ilmu lain tidak bertentangan satu sama lain, tapi saling menguatkan. Beliau menyebut sosiologi, sejarah, dan ilmu-ilmu lain yang dikenal sebagai ilmu umum. Pengagum Al-Ghazzali, K.H. Irfan Hielmy memiliki pandangan progresif tentang agama, ilmu pengetahuan, tasawwuf, dan filsafat. Karena Islam agama fitrah, maka semua ilmu pasti sejalan dengan fitrah manusia, dan karena itu penting dipelajari. Lama yang dimaksud Al-Quran bukan hanya ulama dalam bidang agama saja, beliau menekankan, tetapi ulama dalam segala bidang ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Ilmu pengeta-

33. K.H. Irfan Hielmy, *Sentuhan Wahyu Penyadar Kalbu*, 35.



ZIARAH

huan sangat diperlukan Islam. Pendidikan karakter bangsa baginya harus terpadu dengan pendidikan ilmu pengetahuan dalam arti yang luas.

Lebih luas lagi, K.H. Irfan Hielmy menulis, kemajemukan agama tidak saja diakui sebagai realitas empirik masyarakat Indonesia yang tidak bisa dinafikan dan ditolak, bahkan menjadi salah satu pendorong dinamika masyarakat dan pembangunan. Mengutip Susan O'Connor yang menyebut "cultural pluralism", K.H. Irfan Hielmy menekankan masyarakat yang multi etnik dan multi agama, dimana masing-masing menghormati satu sama lain, menikmati kesamaan hak, serta memelihara dan memperkembangkan kebudayaan tradisinya masing-masing.³⁴ Menuju *Khairu Ummah*, tidak berarti menjadi umat yang eksklusif dan terpisah dari umat-umat lain, tapi justru saling belajar, memahami, dan bahkan bekerja sama untuk kepentingan bersama yang lebih luas.

Pemikiran K.H. Irfan Hielmy adalah pemikiran *Ahlus Sunnah wal-Jama'ah*, mengikuti dan menerjemahkan pendapat ulama-ulama seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam al-Ghazzali, Ibnu Taimiyah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, tapi juga Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Rida, Sayyid Qutb, Sayyid Hawwa, dan lain-lain. Di Indonesia, K.H. Irfan Hielmy berpendapat, ulama-ula-

34. K.H. Irfan Hielmy, *Sentuhan Wahyu Penyadar Kalbu: Bahan Renungan Pribadi Sufi* (Bandung dan Ciamis: Yrama Widya dan Pusat Informasi Pesantren Darussalam, 2003), 107.



ZIARAH

ma dibawah NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam, Majelis Da'wah Islamiyyah, Al-Jami'atul Washliyah, Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, Sarikat Islam, dan lain-lain, termasuk al-firqah Ahlussunnah wal Jamaah.³⁵ Tapi beliau juga membaca dan meramu pemikiran-pemikiran di dunia Barat dan Timur, termasuk di tanah air yang relevan dan tepat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan umat Islam. Baginya, tidak ada kontradiksi antara Islam dan kemanusiaan, antara Islam dan moderasi, antara iman dan demokrasi, antara ihsan dan diplomasi.

K.H. Irfan Hielmy adalah sosok kyai Salafi yang Khalafi, yang ingin terus menanamkan nilai-nilai universal Islam dan menerjemahkan khasanah klasik dan abad pertengahan Islam dalam konteks kekininan dan dalam konteks integrasi bangsa Indonesia yang ia sangat cintai.

(217)

Wallahu'alam bish-shawwab.

35. K.H. Irfan Hielmy, *Bunga Rampai Menuju Khairu Ummah I*, 43.